

KONSTITUSIONALITAS PENGGANTIAN CALON ANGGOTA LEGISLATIF TERPILIH OLEH PARTAI POLITIK SEBELUM PELANTIKAN

Oleh
Joel Oktavianus Lohonauman
NIM.2105040093

ABSTRAK

Pemilihan umum merupakan pilar utama dalam sistem demokrasi Indonesia yang menempatkan kedaulatan di tangan rakyat. Melalui pemilu, rakyat memberikan mandat langsung kepada calon anggota legislatif yang dipercaya mewakili aspirasi mereka. Namun, dalam praktiknya muncul fenomena penggantian calon anggota legislatif terpilih oleh partai politik sebelum pelantikan resmi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Fenomena ini menimbulkan polemik serius karena berpotensi mencederai prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan pemilu, serta membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan partai. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji konstitusionalitas praktik penggantian tersebut menggunakan pendekatan normatif dan konseptual, dengan teori hukum sebagai sistem norma dari Hans Kelsen sebagai pisau analisis. Teori ini menekankan pentingnya keselarasan setiap norma hukum dalam satu hierarki yang berujung pada norma dasar atau Grundnorm, yakni UUD NRI 1945. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan penggantian calon terpilih sebelum pelantikan tanpa dasar hukum yang jelas bertentangan dengan prinsip demokrasi konstitusional dan asas kedaulatan rakyat sebagaimana diatur dalam UUD NRI 1945. Ketiadaan norma eksplisit dalam UU Pemilu dan UU Partai Politik menjadi celah yang memungkinkan partai politik mengganti calon terpilih secara sepihak. Hal ini pada akhirnya merugikan hak politik warga negara dan melemahkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan regulasi guna mempertegas perlindungan terhadap suara rakyat dalam sistem pemilu proporsional terbuka.

Kata Kunci: Konstitusionalitas, Caleg Terpilih, Partai Politik, Pemilu, Kedaulatan Rakyat

**CONSTITUTIONALITY OF THE REPLACEMENT OF ELECTED
LEGISLATIVE MEMBERS BY POLITICAL PARTIES BEFORE
INAUGURATION**

**By:
Joel Oktavianus Lohonauman
2105040093**

ABSTRACT

General elections are a fundamental pillar of Indonesia's democratic system, placing sovereignty firmly in the hands of the people. Through elections, citizens grant a direct mandate to legislative candidates they trust to represent their aspirations. However, in practice, there has emerged a phenomenon of elected legislative candidates being replaced by political parties before their official inauguration by the General Elections Commission (KPU). This practice raises serious constitutional issues, as it potentially undermines the principle of popular sovereignty and electoral fairness while opening opportunities for the abuse of party power. This study aims to examine the constitutionality of such replacement practices using a normative and conceptual approach, applying Hans Kelsen's theory of law as a system of norms as the main analytical framework. This theory emphasizes the hierarchical structure of legal norms, culminating in a fundamental norm (Grundnorm), namely the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The findings reveal that replacing elected candidates before inauguration, without a clear legal basis, contradicts constitutional democracy and violates the principle of popular sovereignty as enshrined in the 1945 Constitution. The absence of explicit norms in the Election Law and the Political Parties Law creates a loophole allowing political parties to unilaterally replace elected candidates. Ultimately, this harms citizens' political rights and erodes public trust in the democratic system. Therefore, legal reform is needed to strengthen protections for the people's votes within the open proportional electoral system.

Keywords: *Constitutionality, Elected Candidate, Political Party, Election, People's Sovereignty*